

# **SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH BERBASIS ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)**

**(Studi Kasus: MUSRENBANG Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara)**

**Rymond N. Batawi<sup>1)</sup> Eko Sedyono<sup>2)</sup>**

<sup>1)2)</sup> Magister Sistem Informasi, FTI, Universitas Kristen Satya Wacana  
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711 Indonesia  
email : rymond\_batawi@yahoo.com<sup>1)</sup>, ekosed1@yahoo.com<sup>2)</sup>

## **Abstract**

*One of the important part in the process of construction of North Halmahera Regency Area is the determination of strategic planning for the improvement of the quality of the performance of such establishments. In carrying out or assisting the determination of planning-planning is still in the form of execution which is still done manually by the leadership of the party, thereby impeding the performance of these institutions a bit in determining the timing of the decision on the strategic planning decisions.*

*Information technology can be used to assist in the improved performance of a business or organization. An organization that consists of a lot of people need to manage knowledge derived from these people through the process of knowledge management (KM).*

*In this research will be applied the concept of knowledge management on strategic planning for the improvement of the quality of the performance of the agencies in North Halmahera Regency and applying methods of Analytical Hierarchy Process (AHP) to give advice in determining strategic planning decisions in development planning Congress (MUSRENBANG).*

## **Key words**

*Knowledge Management, Analytical Hierarchy Process (AHP).*

## **1. Pendahuluan**

Kemajuan teknologi dan informasi sangat berperan penting dalam perkembangan sebuah wilayah yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Kabupaten Halmahera Utara (HALUT) sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Indonesia harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk dapat bersaing dengan kabupaten lain yang ada di Indonesia dengan cara menangkap, mengelola, dan memanfaatkan *knowledge* serta informasi dengan cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan dalam mengelola *knowledge* dan informasi merupakan upaya untuk mempertahankan posisi dan daya saing suatu instansi, demikian halnya dengan instansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten HALUT. Pemerintah Daerah perlu mengelola dan memaksimalkan *knowledge* yang telah dimiliki untuk sebuah perencanaan pembangunan yang optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten HALUT juga perlu mengelola *knowledge* secara transparan dan mengajak peran serta dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Transparansi dan partisipasi di dalam instansi Pemerintah Daerah Kabupaten HALUT sangat diperlukan dalam setiap kegiatan pemerintahan karena telah diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Era keterbukaan informasi di Indonesia sudah dimulai sejak disahkannya UU No.14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2010. Selain KIP, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam perumusan kebijakan pemerintah seperti yang telah diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan dan Inpres RI No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-